



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



SELASA PAHING

4 FEBRUARI 2025 (5 RUWAH 1958 / TAHUN LXXX NO 126)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

296 KEPALA DAERAH SIAP DILANTIK Presiden Pilih 20 Februari

JAKARTA (KR) - Presiden RI Prabowo Subianto memilih tanggal 20 Februari 2025 untuk digelar pelantikan kepala daerah. Tanggal itu dipilih menyesuaikan dengan putusan dismissal yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku sebelumnya telah mengusulkan tanggal 18, 19, 20 Februari untuk digelar pelantikan kepala daerah non-sengketa dan hasil putusan dismissal MK ke Presiden Prabowo. "Kita mengancer kira-kira tanggal 18, 19, 20 dan saya melapor kepada Pak Presiden dan Presiden memilih tanggal 20 (Februari), hari Kamis," ungkapnya dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (3/2).

Tito menyebut terdapat 296 kepala daerah non-sengketa yang siap untuk dilantik. Sementara, terdapat 249 daerah yang masih bersengketa di MK. Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 mengalami penyesuaian jadwal. Semula pelantikan 296 kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK direncanakan pada 6 Februari 2025.

Namun, Tito dalam konferensi persnya pada Jumat (31/1) sore mengumumkan bahwa pelantikan tersebut akan digabung dengan kepala daerah yang perkaranya telah diputus melalui mekanisme dismissal oleh MK. Keputusan ini diambil menyusul jadwal pembacaan putusan dismissal untuk 310 sengketa pilkada oleh MK pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025. Dengan demikian, pelantikan serentak tahap kedua akan dilakukan setelah putusan tersebut, dengan waktu yang tidak terpaud jauh. (Ant/Has)-d



ANTRE GAS/ELPIJI: Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan gas/elpiji 3 kilogram di Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Senin (3/2/2025). Warga setempat mengeluhkan sulitnya mendapatkan elpiji 3 kg dalam beberapa hari terakhir dampak dari kebijakan baru yang melarang penjualan gas subsidi tersebut di tingkat pengecer dan mengharuskan membeli di pangkalan resmi.

Permintaan Banggar DPR RI

RTM, Lansia dan UMK Bisa Akses LPG 3 Kg

JAKARTA (KR) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah memastikan kelompok rumah tangga miskin (RTM),

lansia serta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) tetap bisa mengakses LPG 3 kilogram selama masa peralihan kebijakan baru. Pemerintah melalui Kement-

terian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penjualan LPG 3 kg hanya sampai ke level pangkalan per 1 Februari 2025. Seiring dengan itu,

pengecer diminta mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi.

"Banggar DPR meminta pemerintah dan PT Pertamina perlu memastikan jaminan subsidi

LPG 3 kg terhadap rumah tangga miskin, lansia dan pelaku usaha mikro dan kecil tetap terjangkau mereka," kata Said, Senin (3/2).

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyiapkan tim darurat. Dengan begitu, ketiga kelompok tersebut

* Bersambung hal 7 kol 1



Analisis Paradigma Baru Hukum Pertanahan

Dr Sudiya SH MHUM

MEMASUKI 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, publik dibuat geger oleh pagar laut yang membentang sampai dengan 30 km di Tangerang, dan telah bersertifikat. Sebanyak 263 sertifikat HGB yang terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan dan 17 bidang HM menjadi perdebatan publik, karena telah merugikan para nelayan yang kehilangan akses untuk mencari ikan.

Pada sisi lain, secara bisnis hamparan laut yang secara ilmiah dapat berubah menjadi daratan (reklamasi) sangat berpotensi mendatangkan keuntungan dan atau laba. Bagaimana laut dapat dikavling-kavling yang kemudian diterbitkan sebuah hak kepemilikan. Pada prinsipnya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk laut pesisir tergantung pada negara.

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:56	15:13	18:08	19:20	04:21

Selasa, 4 Februari 2025 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

SERANG KOTA DI DEKAT IBUKOTA HAITI Geng Bersenjata Ngamuk, 50 Tewas

BOGOTA (KR) - Sedikitnya 50 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan yang dilakukan geng bersenjata di Kenscoff, sebuah kota yang terletak sekitar 10 kilometer dari ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Serangan yang digambarkan sebagai operasi berskala besar untuk merebut kendali wilayah tersebut juga menyebabkan 100 rumah terbakar, menurut laporan organisasi masyarakat sipil independen.

Juru bicara Kepolisian Nasional Haiti, Michel-Ange Louis Jeune, mengatakan pasukan keamanan berhasil menewaskan 20 anggota geng selama operasi berlangsung dan memastikan bahwa langkah-langkah telah diambil untuk memulihkan ketertiban. Pasukan tambahan telah dikirim ke kota tersebut setelah aparat keamanan setempat kewalahan menghadapi serangan.

Haiti, negara berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa, telah lama bergulat dengan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Saat ini, diperkirakan sekitar 80 persen wilayah Port-au-Prince berada di bawah kendali geng bersenjata, sementara kekerasan terus meningkat.

Sepanjang tahun 2024 saja, lebih dari 5.000 orang tewas dalam serangan terkait geng. Ketidakstabilan di negara itu juga menyebabkan pergantian kepemimpinan yang sering terjadi.

Perdana Menteri Ariel Henry mengundurkan diri pada 25 April 2024 di tengah krisis yang memburuk. Dewan Transisi kemudian menunjuk Garry Conille sebagai penggantinya, namun pada 11 November, ia digantikan oleh pengusaha Alix Didier Fils-Aime. (Ant)-d

TUNTUT STATUS PPPK PENUH WAKTU Ribuan Tenaga Honorer Geruduk DPR



Tenaga honorer R2 dan R3 menggelar aksi menuntut status PPPK Penuh Waktu di halaman depan Gedung MPR dan DPR RI Jakarta, Senin (3/2/2025).

JAKARTA (KR) - Ribuan tenaga honorer R2 dan R3 menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI Jakarta, Senin (3/2). Mereka menuntut agar bisa masuk ke dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Massa merupakan tenaga honorer R2

dan R3 yang namanya sudah masuk di dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun belum mendapatkan formasi itu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia mulai dari Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Tangerang, Cianjur, Indramayu, dan Banten.

* Bersambung hal 7 kol 1

MBG DILAKSANAKAN SENTRALISTIK Anggaran Daerah untuk Perbaikan Sekolah

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar anggaran daerah yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan penggunaannya untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah.

"Perintah Bapak Presiden kepada kami, untuk anggaran yang di daerah-daerah yang semula menganggarkan untuk Makan Bergizi Gratis itu lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah," kata Tito dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).

Sebab, kata Mendagri, pelaksanaan Program MBG dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hal itu sebagaimana respons yang diperolehnya ketika menyampaikan kepada Presiden Prabowo terkait beberapa daerah yang mengalokasikan anggaran Program MBG dalam nomenklatur Belanja Tidak Terduga (BTT) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dalam Rapat Paripurna sudah disampaikan bahwa khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Tito menyebut, Presiden Prabowo memberikan atensi agar pelaksanaan Program MBG tak mengesampingkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang menjadi aspek penting pula dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

* Bersambung hal 7 kol 5

SEJAK 2020 BELUM CAIR Dosen ISI Yogya Menuntut 'Tukin'

BANTUL (KR) - Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Sewon Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiknasaintek (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, Sains dan Teknologi) wilayah Yogyakarta menggelar unjukrasa di halaman Gedung Rektorat ISI, Senin (3/2). Mereka menuntut pemerintah agar segera mencairkan Tunjangan Kinerja (Tukin).

Koordinator sekaligus Dosen Prodi Musik ISI Yogyakarta Titis Setyono Nugroho mengungkapkan, sejak tahun 2020 hingga saat ini, Tukin seluruh Dosen ASN Kemendiknasaintek RI belum kunjung cair. Menurut Titis, Tukin itu sendiri sebenarnya memiliki bermacam-macam manfaat, meliputi sarana kinerja

untuk penelitian hingga kegiatan dosen yang harus dijalankan.

"Ini sebagai informasi, selama ini dosen dibayar

hanya gaji pokok dan uang lauk pauk," paparnya.

Di ISI Yogyakarta ada 400 hingga 500 dosen yang Tukinnya belum

cair. Kalau di seluruh Indonesia ada 88.299 dosen. "Oleh karena itu, kami minta skema tiga yang dibayarkan, bukan skema

satu dengan nilai Rp 2,5 triliun. Ini kami menuntut Rp 8 triliun dan masih 14 bulan. Jadi sebetulnya kami menuntut lebih dari itu," ujar Titis.

* Bersambung hal 7 kol 5



Flashmob dalam aksi damai menuntut pembayaran Tukin Dosen ASN ISI Yogyakarta.

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● SAYA punya teman yang berjualan buku-buku terbitan lama. Suatu hari, ada seorang ibu membeli buku karya penulis X. Selain memborong buku, dia sangat berterimakasih kepada teman saya karena akhirnya punya arsip berupa buku karya X yang ternyata kakeknya. (Sutono, Adiwerna Tegal)-d